

ISBN : 978-979-19764-0-4

Proceeding

24. ...
26. ...
28. ...
30. ...
32. ...
34. ...
36. ...
38. ...
40. ...
42. ...
44. ...



The International Seminar of Physical Education and Sport

Building Health, Excellence,
Wellbeing and Friendly People Through Physical Education and Sport



SEMARANG STATE UNIVERSITY
28-29 April 2009

Dissociation of Politics and Sport

Tomoliyus
Yogyakarta Syaye University

Since early athletic party [of] modern olympiade [in] Athena 1896 performed to bring august mission to firm up nation [in] world and dissociate can possible [is] athletic the than political interference. At the (time) of Pierre Coubertin de write new charter [of] Olympiad [in] year 1896, have never been passing by quickly its marrow if political later; then so I have the power athletic shadow [him/it]. Though in Olympiad charter [is] expressly expressed that Olympiad represent ajang to braid brotherhood and solidarity between entire/all nation, ethical and race. In consequence, strive to interlard athletics with political issue and rasialisme, interfere in reality hotly biggest athletic party [of] this world Since long time there [is] effort to dissociate athletic activity, especially Olympiad, with politics. But, strive that always fail.

Olahraga merupakan sub sistem masyarakat yang terkait dengan strategi-strategi logika politik. Di satu sisi, olahraga dipengaruhi oleh politik menurut kemungkinannya, dilain pihak, olahraga juga merupakan sebuah instrument politik dan dikawatirkan digunakan untuk maksud – maksud politik.

Sejak awal pesta olahraga olympiade modern di Athena 1896 digelar mengemban misi mulia untuk mempersatukan bangsa-bangsa di dunia dan memisahkan sebisa mungkin olahraga dari campur tangan politik. Pada saat Pierre de Coubertin menulis piagam baru Olimpiade di tahun 1896, tak pernah terlintas dibenaknya jika kemudian politik sebegitu kuasanya membayang-bayangi olahraga. Padahal dalam piagam Olimpiade secara tegas dinyatakan bahwa Olimpiade merupakan ajang untuk menjalin solidaritas dan persaudaraan antar seluruh bangsa, etis dan ras. Karena itu, upaya mencampurkan olahraga dengan isu politik dan rasialisme, bertentangan nyata dengan semangat pesta olahraga terbesar dunia ini.

Sejak lama ada usaha untuk memisahkan kegiatan olahraga, terutama Olimpiade, dengan politik. Tapi, upaya itu selalu gagal. Kalau saja dunia mau jujur, sebenarnya keterkaitan antara keduanya sudah terpatri dalam peraturan penyelenggaraan Olimpiade itu sendiri. Misalnya setiap meraih medali selalu pengibaran bendera dan pengumandungan lagu kebangsaan negara asal atlet pemenang salah satu cabang olahraga sebagai contoh. Itu saja sudah menunjukkan tentang bagaimana olahraga sudah terpolusi oleh politik.

Sejarah telah beberapa kali merekam tentang intervensi politik terhadap ajang yang sebenarnya dimaksudkan untuk memupuk sportivitas dan persahabatan antarnegara dan bangsa ini.

Orang juga tak melupakan kejadian berdarah pada Olimpiade 1972 di Muenchen, ketika para pejuang radikal Palestina menyandera dan kemudian membunuh 11 atlet Israel. Itu adalah upaya menarik perhatian dunia akan nasib bangsa Palestina yang tergusur dari tanah leluhur mereka.

Pada Olimpiade 1980 di Moskow, AS dan negara-negara Barat memutuskan tak hadir sebagai protes atas penyerbuan Uni Soviet terhadap Afganistan.

Empat tahun kemudian, Uni Soviet dan sekutunya membalas boikot itu dengan tak hadir pada Olimpiade 1984 di Los Angeles. Aksi Uni Soviet diikuti oleh negara-negara satelitnya di Eropa Timur. Akibatnya, Olimpiade 1984 berjalan hambar. Maklumlah, negara-negara sosialis di masa itu merupakan gudang atlet kelas dunia.

esta akbar olahraga seperti olimpiade sebenarnya dapat mendorong dilakukannya keterbukaan politik di sebuah negara. Hal ini ditunjukkan ketika berlangsungnya olimpiade tahun 1988 di Seoul, Korea Selatan. Hasilnya liberalisasi politik dalam negeri Korea Selatan dan mendapat pengakuan dari negara sosialis lainnya, yang sebelumnya hanya menjalin hubungan diplomatik dengan Korea Utara.

Dari semua kejadian yang dibebaskan di atas, Olimpiade Beijing 2008 yang juga merupakan puncak dari keterkaitan antara olahraga dan politik.

Sejak jauh hari sebelum dimulai, ia telah dikotori faktor politik. Protes warga Tibet ternyata tidak terbatas di Tibet, tapi menyebar ke seluruh pemukiman mereka di seluruh China dan di negara-negara lain. Unjuk rasa mereka juga didukung para aktivis LSM internasional.

Buat China sendiri, Olimpiade Beijing 2008 memiliki arti penting yang nuansa politiknya sangat tebal. Ketika mendiang Mao Zedong memproklamasikan berdirinya RRC sebagai sebuah negara itu pada 1 Oktober 1949, antara lain ia mengatakan, "Bangsa kita tidak lagi akan jadi obyek pemerasaan, penghinaan, dan pembudakan dari bangsa lain."

Sejak saat itu, RRC selalu berjuang menempatkan dirinya pada posisi terhormat di pentas dunia.

Tapi, selama hampir 50 tahun (1945-1990), Mao selalu berada di bawah bayang-bayang Uni Soviet dan AS, sebagai dua aktor utama di panggung Perang Dingin. Mao telah mencoba melepaskan diri dari bayang-bayang kedua adikuasa dan berperan sebagai kekuatan ketiga dengan cara menghimpun kekuatan negara-negara berkembang. Toh, usaha itu tak banyak mendatangkan sukses.

Sukses Beijing sebagai salah satu pelaku yang turut menentukan corak dunia justru diraih setelah mendiang Deng Xiaoping mengambil langkah berani. Ia berbalik 180 derajat dengan meninggalkan prinsip-prinsip Maois dan mengadopsi model pembangunan kapitalistik. Hasilnya adalah perkembangan ekonomi di atas 8% per tahun dan telah menempatkannya sejajar dengan negara-negara kapitalis dunia.

Sejarah China selama sekitar satu abad antara 1838, yakni dimulainya intervensi dan intrusi kolonialisme dan imperialisme Barat, sampai 1949 ketika RRC berdiri, dipenuhi perasaan sebagai bangsa tertindas dan terhina.

Hampir semua kekuatan dunia memiliki konsesi di China dan tak mengherankan jika Bapak Republik Dr Sun Yat-sen mengatakan bahwa nasib bangsa China lebih buruk dari bangsa lain karena ia dijajah banyak negara.

Tak mengherankan pula jika para sejarawan Marxis di China menyebut masa selama satu abad itu sebagai abad humiliasi (penghinaan) nasional.

Karena itu, penyelenggaraan Olimpiade di Beijing tak dapat dipisahkan dari sejarah penghinaan, sukses pembangunan ekonomi, dan kebangkitan nasional bangsa China. Olimpiade Beijing 2008 adalah sebuah lambang tentang keberhasilan China yang telah bangkit kembali dari posisi terhina selama satu abad dan berhasil menempatkan diri sebagai aktor yang perannya sejajar dengan negara-negara besar lain.

Olimpiade Beijing juga merupakan lambang balas dendam China atas satu abad penghinaan yang dilakukan bangsa-bangsa Barat dan Jepang terhadap bangsa dan negara China.

Oleh karena itu, RRC tak akan membiarkan sekecil apapun yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang akan mengganggu keberhasilan penyelenggaraan pesta olahraga dunia itu.

Dengan demikian, sejarah membuktikan bahwa slogan pemisahan olahraga dari arena politik sejatinya hanya mitos dan propaganda negara-negara besar. Pengalaman penyelenggaraan olimpiade selama 10 dekade belakangan ini menunjukkan bahwa olimpiade tak bisa lepas dari pertarungan politik kekuatan dunia. Kenyataan naif ini seakan hendak menyatakan bahwa hanya negara-negara dunia ketiga semata yang tidak

berhak untuk mencampuradukkan olahraga dan politik. Sementara negara-negara bebas bersikap semau mereka. X

Bagaimana Olahraga dan Politik di Indonesia ?

Pada Asian Games IV 1962 di Jakarta, suatu bukti bahwa BungKarno memanfaatkan olahraga sebagai bagian dari alat politik dalam kebijakan internasional. Dalam penuturannya yang diungkapkan kembali oleh Maulwi Saelan (2002), Bungkarno mengatakan bahwa penyelenggaraan Asian Games IV/1962 sebagai " ... kesempatan yang baik , momentum yang baik untuk kita," dan bahkan ada pengakuan beliau bahwa " ... pesta olahraga ini tidak dilepaskan dari politik." IOC di bawah kepemimpinan Avery Brunge dari AS mengertik habis-habisan bahwa olahraga dan Asian Game IV di Jakarta kental dengan motif politik.

Di Indonesia membuktikan bahwa menjelang pemilu, olahraga sebagai sarana atau media untuk mempromosikan organisasi Partai atau calon DPR, Calon Pejabat daerah, maupun calon Presiden . Misal nya lomba bersepeda semua peserta pakai kaos salah satu lambang PARNPOL, Calon pejabat Daerah maupun calon Presiden.

Disamping itu olahraga di Indonesia butuh undang-undang, tahun 2005. Pemerintah dan DPR menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan memecah KONI menjadi KON dan KOI.

Tahun 2007. Pemerintah menerbitkan dan Peraturan Pemerintah Nomor 16, 17, dan 18 Tahun 2007 sebagai peraturan pelaksanaan UU No. 3 Tahun 2005. KONI menyelenggarakan Musornas Luar Biasa (Musornaslub) pada 30 Juli yang membentuk Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan menyerahkan fungsi sebagai NOC Indonesia dari KONI kepada KOI kembali. Nama KONI tetap dipertahankan dan tidak diubah menjadi KON.

Atas dasar sejarah tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa susah dipisahkan politik dan olahraga, karena olahraga perlu ada politik, begitu sebaliknya politik perlu olahraga sebagai sarana atau media, tetapi bukan politisasi olahraga (misal olahraga dipakai sebagai kegiatan presentasi politik, tawaran yang berlebih untuk membangun fasilitas olahraga yang besar tetapi melupakan lingkungan, memboikot pertandingan olahraga). Sebab olahraga dipolitisasi akan menghambat atau merusak pembinaan prestasi olahraga. Disamping itu olahraga jangan dijadikan ajang berpolitik itu jelas salah dan melanggarkaidah,

kan
saja
ang
nal
grai
pun
aan
rang
dari
rang
nya
ikan
sial
urus
jadi
rang
alah
kan,
stem
stem
yang
ada
aruhi
bagai
lebih
apat
dan
ulan
dikaji
ikum
untuk
untuk
anpa

KEPUSTAKAAN

4

Mecum, Vade. 2000. *Directory of Sport Science*. Berlin:ICSSPE/CIEPSS.
Haag, Herbert. 1994. *Theoretical Foundation of Sport Science as a Scientific Discipline*.
German: Verlag Karl Hofmann.

